**ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA
PERMUKIMAN PADA KECAMATAN BUPON
KOTA PALOPO**

**DISUSUN OLEH:
KELOMPOK III**

WIDARNA	20.023.22.201.093
RISKA WIJAYA	20.023.22.201.217
MARIA TUNGGA	20.023.22.201.095
NURHIDAYAH	20.023.22.201.098

**DOSEN:
AMIRUDDIN AKBAR FISU,ST.,MT.**

**FAKULTAS TEKNIK JURUSAN SIPIL
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena, berkat limpahan dan rahmat-Nya, kami selaku penyusun dapat menyelesaikan laporan ini guna mengetahui sebagai pembelajaran dan untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Wilayah dan Kota.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kepada dosen pembimbing kami meminta masukannya demi perbaikan laporan yang lebih baik dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca.

Akhir kata kami selaku penyusun mengucapkan terimakasih.

BUPON, 20 Januari 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1 Tinjauan Umum.....	3
2.2 Standar Sarana dan Prasarana Wilayah	4
BAB III PEMBAHASAN	15
3.1 Gambaran Umum Wilayah.....	15
3.2 Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir.....	15
3.3 Jumlah Fasilitas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan	16
3.4 Proyeksi Penduduk 20 Tahun yang akan datang	16
3.5 Kebutuhan Sarana dan Prasarana 20 tahun yang akan datang	17
BAB IV PENUTUP.....	20
4.1 Kesimpulan.....	20
4.2 Saran	20
DAFTAR PUSTAKA	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kebutuhan Program Ruang Minimum	8
Tabel 2.2	Kebutuhan Sarana Pendidikan Dan Pembelajaran.....	8
Tabel 2.3	Pembakuan Tipe SD/MI, SLTP/Mts & SMU	9
Tabel 2.4	Kebutuhan ruang belajar pada SD/MI, SLTP/MTs & SMU	9
Tabel 2.5	Kebutuhan Luas Lantai dan Lahan Sarana Pendidikan Menurut Tipe Sekolah	10
Tabel 2.6	Jenis Sarana Perdagangan dan Niaga	12
Tabel 2.7	Kebutuhan Sarana Kesehatan.....	14
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir.....	15
Tabel 3.2	Jumlah Fasilitas Pendidikan.....	16
Tabel 3.3	Jumlah Fasilitas Ekonomi	16
Tabel 3.4	Jumlah Fasilitas Kesehatan	16
Tabel 3.5	Proyeksi Penduduk 20 Tahun yang Akan Datang	16
Tabel 3.6	Kebutuhan Sarana Pendidikan ditahun 2025.....	17
Tabel 3.7	Kebutuhan Sarana Pendidikan ditahun 2030.....	17
Tabel 3.8	Kebutuhan Sarana Pendidikan ditahun 2035.....	17
Tabel 3.9	Kebutuhan Sarana Pendidikan ditahun 2040.....	17
Tabel 3.10	Kebutuhan Sarana Ekonomi ditahun 2025.....	18
Tabel 3.11	Kebutuhan Sarana Ekonomi ditahun 2030.....	18
Tabel 3.12	Kebutuhan Sarana Ekonomi ditahun 2035.....	18
Tabel 3.13	Kebutuhan Sarana Ekonomi ditahun 2040.....	18
Tabel 3.14	Kebutuhan Sarana Kesehatan ditahun 2025	19
Tabel 3.15	Kebutuhan Sarana Kesehatan ditahun 2030	19
Tabel 3.16	Kebutuhan Sarana Kesehatan ditahun 2035	19
Tabel 3.17	Kebutuhan Sarana Kesehatan ditahun 2040	19

ABSTRAK

Paper ini membahas tentang bagaimana kebutuhan sarana dan prasarana dikecamatan BUPON Kota Palopo. Fokus utamanya adalah pada sarana Pendidikan, Kesehatan dan perekonomian. Paper ini juga merupakan tugas mata kuliah Perencanaan Wilayah Dan Kota Semester III.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan (Growth) merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan ekonomi akan dapat dinikmati masyarakat sampai dilapisan paling bawah, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan campur tangan pemerintah. Pertumbuhan harus berjalan beriringan dan terencana, mengupayakan pemerataan kesempatan dan pembagia hasil-hasil pembangunan dengan terciptanya lebih merata. Dengan demikian maka daerah yang miskin, tertinggal, tidak produktif akan menjadi produktif, yang akhirnya akan mempercepat pertumbuhan itu sendiri. Strategi ini dikenal dengan istilah "redistribusi with growth".

Pertumbuhan ekonomi daerah yang berbeda-beda intensitasnya akan menyebabkan terjadinya gangguan ekonomi dan pendapatan antar daerah. Kecamatan Bupon harus dapat memenuhi sarana prasarana untuk dapat melayani masyarakat secara optimal. Untuk mendukung pertumbuhan, pembangunan dan mengurangi kejadian-ketimpangan serta memberikan pelayanan pada masyarakat perlu diamati selama siklus ekonomi sedang berlangsung sinyalemen positif atau negatif sehingga mempengaruhi kinerja ekonomi makro secara umum dapat mempengaruhi fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Kecamatan Bupon harus memiliki sarana dan prasarana untuk dapat melayani masyarakat, baik dari segi pendidikan, ekonoomi maupun dari segi kesehatan berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk.

1.2 Maksud dan Tujuan

Bertitik tolak dari latar belakang Kecamatan Tanalili, maka tujuan dari penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menggambarkan keadaan wilayah pusat pertumbuhan di Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu

2. Untuk menganalisis kebutuhan pengembangan penyediaan prasarana pendidikan, kesehatan pada wilayah pusat pertumbuhan di Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu sampai tahun 2042.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum

Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan dasar dari suatu permukiman (Fisu,2018). Pemenuhan sarana dan prasarana tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan permukiman, namun juga dapat meningkatkan perekonomian penduduk (Fisu,2020).

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (spatial space) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg,1988 dalam Kodoatie,2005:8). Sementara itu adapun pengertian prasarana menurut Jayadinata (1992 dalam Juliawan,2015:5) prasarana merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai, prasarana kota merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota. Dengan demikian prasarana kota merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota, yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota.

Prasarana lingkungan merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, lebih jelasnya prasarana lingkungan atau sarana yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman adalah jaringan jalan untuk mobilitas orang dan angkutan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur, jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah dan

tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan, serta jaringan saluran air hujan untuk pematusan (drainase) dan pencegah banjir setempat.

Fungsi prasarana adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya, upaya memperbaiki lingkungan membutuhkan keseimbangan antar tingkat kebutuhan masyarakat (Diwiryono, 1996 dalam Juliawan, 2015:6) 22.

Dari pengertian tersebut dapat disederhanakan bahwa prasarana merupakan kerangka dasar dari suatu sistem, kerangka dasar tersebut menjadi fasilitas umum dan pelengkapan dasar fisik yang memungkinkan lingkungan untuk berfungsi sebagaimana mestinya, serta menjadi penentu keberhasilan dari suatu perkembangan kota.

Sebagai salah satu konsep pola pikir di bawah ini diilustrasikan diagram sederhana bagaimana peran infrastruktur. Diagram ini menunjukkan bahwa secara ideal lingkungan alam merupakan pen-K0KJM,dukung dari sistem infrastruktur, dan sistem ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur. Sistem sosial sebagai obyek dan sasaran didukung oleh sistem ekonomi.

2.2 Standar Sarana dan Prasarana Wilayah

Standar Nasional Indonesia (SNI 03-1733-2004) yang dikeluarkan oleh BSN tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan ini disusun oleh Panitia Teknik Konstruksi dan Bangunan. Standar ini memuat uraian detail prinsip-prinsip perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, yang disusun sebagai revisi dari SNI 03-1733-1989 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.

Standar ini disusun melalui konsensus di Bandung pada tanggal 17 Juni 2003, yang dihadiri oleh stakeholder terkait. Apabila dalam penerapan standar ini terdapat hal-hal yang meragukan, diharapkan dapat membandingkan secara langsung dengan substansi yang terdapat dalam acuan tersebut, atau dengan edisi yang terakhir, kecuali hal-hal yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Standar Nasional Indonesia Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan adalah panduan (dokumen nasional) yang berfungsi sebagai kerangka

acuan untuk perencanaan, perancangan, penaksiran biaya dan kebutuhan ruang, serta pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman.

2.3 Sarana Pendidikan dan Pembelajaran

1) Deskripsi Umum

Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan:

- a) berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan;
- b) optimasi daya tampung dengan satu shift;
- c) efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu;
- d) pemakaian sarana dan prasarana pendukung;
- e) keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.

2) Jenis Sarana

Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal / umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU). SNI 03-1733-2004 25 dari 52.

Adapun penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi:

- a) taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
- b) sekolah dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
- c) sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD);
- d) sekolah menengah umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
- e) sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan.

3) Kebutuhan Ruang dan Lahan

Berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan pada penentuan kebutuhan ruang dan lahan adalah:

- a) Penyediaan jumlah sarana pendidikan dan pembelajaran yang harus disediakan didasarkan pada Tabel 9.
- b) Kebutuhan sarana pendidikan prabelajar serta pendidikan tingkat dasar dan menengah, harus direncanakan berdasarkan perhitungan proyeksi jumlah siswa dengan cara sebagaimana Rumus 2, Rumus 3, Rumus 4 dan Rumus 5, yang akan menentukan tipe sekolah serta kebutuhan jumlah ruang, luas ruang dan luas lahan. Rumus 2, Rumus 3, Rumus 4 dan Rumus 5, dipergunakan juga untuk menghitung penambahan ruang-ruang belajar pada sekolah-sekolah yang sudah ada.
- c) Perencanaan kebutuhan ruang dan lahan untuk sarana pendidikan didasarkan tipe masing-masing sekolah yang dibedakan menurut:
 - 1) jumlah rombongan belajar;
 - 2) jumlah peserta didik;
 - 3) jumlah tenaga kependidikan; kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga tata usaha;
 - 4) kebutuhan ruang belajar, ruang kantor, dan ruang penunjang;
 - 5) luas tanah, dan lingkungan/lokasi sekolah.
- d) Kebutuhan luas lantai dan lahan untuk masing-masing sarana pendidikan tergantung pada tipe sekolah untuk masing-masing tingkatan pendidikan. Untuk perencanaan bangunan SMU, mengacu pada SNI-03-1730-2002 tentang Tata cara perencanaan bangunan gedung sekolah menengah umum. Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada beserta posisi pusat lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan / blok yang nantinya lahir sesuai konteks lingkungannya.

Tabel 2.1 Kebutuhan program ruang minimum

No.	Jenis Sarana	Program Ruang
1.	Taman Kanak-kanak	Memiliki minimum 2 ruang kelas @ 25-30 murid. Dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka/bermain ± 700 m ²
2.	Sekolah Dasar	Memiliki minimum 6 ruang kelas @ 40 murid Dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka / bermain ± 3000-7000 m ²
3.	SLTP	
4.	SMU	
5.	Taman Bacaan	Memiliki minimum 1 ruang baca @ 15 murid

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

Tabel 2.2 Kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Taman Kanak-kanak	1.250	216 termasuk rumah penjaga 36 m2	500	0,28 m2/j	500 m'	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.	2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2.	Sekolah Dasar	1.600	633	2.000	1,25	1.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan.	Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA dalam satu kompleks
3.	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000 m'		
4.	SMU	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000 m'		
5.	Taman Bacaan	2.500	72	150	0,09	1.000 m'	Di tengah kelompok warga tidak menyeberang jalan lingkungan.	

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

Tabel 2.3 Pembakuan tipe SD/MI, SLTP/MTs dan SMU

Tingkat Pendidikan	Tipe Sekolah	Rombongan Belajar	Peserta Didik (siswa)	Lokasi
SD/MI	Tipe A	12	480	Dekat dengan lokasi ruang terbuka lingkungan
	Tipe B	9	360	
	Tipe C	6	240	
SLTP/MTs	Tipe A	27	1.080	
	Tipe B	18	720	
	Tipe C	9	360	
SMU	Tipe A	27	1.080	
	Tipe B	18	720	
	Tipe C	9	360	

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

Tabel 2.4 Kebutuhan ruang belajar pada SD/MI, SLTP/MTs & SMU

Kebutuhan ruang belajar			
Rumus 1 Tingkat pra belajar	Rumus 2 Tingkat SD/MI (berdasarkan sistem pendidikan SD 6 tahun)	Rumus 3 Tingkat SLTP/MTs (berdasarkan sistem pendidikan SLTP/MTs)	Rumus 4 Tingkat SMU (berdasarkan sistem pendidikan SMU)
$S = \frac{(UP5 - Us) \times a\%}{E}$ <p>Keterangan : S kebutuhan jumlah ruang belajar tingkat pra sekolah; UP5 hasil proyeksi anak usia pra sekolah selama 5 tahun; Us jumlah anak usia pra sekolah yang sudah tertampung; a% anak usia pra sekolah yang ingin masuk pendidikan pra sekolah; daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan kondisi lingkungan 35–40 siswa.</p>	$S_{SD} = \frac{(Dp_5 - Ds) \times d\%}{E}$ <p>Keterangan : S_{sd} kebutuhan jumlah ruang belajar tingkat SD/MI; Dp₅ hasil proyeksi anak usia SD/MI selama 5 tahun; DS jumlah anak usia tingkat SD/MI yang sudah tertampung; d% presentase jumlah anak tingkat SD/MI yang perlu memasuki lembaga pendidikan tingkat SD/MI; E daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan kondisi lingkungan 40 siswa.</p>	$S_{SLTP} = \frac{(L_{SD5} - L_{SDS}) \times p\%}{E}$ <p>Keterangan : S_{SLTP} kebutuhan ruang belajar tingkat SLTP; L_{SD5} proyeksi lulusan SD selama 5 tahun; L_{SDS} jumlah lulusan SD yang dapat ditampung; presentase lulusan SD yang melanjutkan ke SLTP; p% presentase lulusan SD yang melanjutkan ke SLTP; E daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan kondisi lingkungan 40 siswa.</p>	$S_{SLTA} = \frac{(L_{SLTP5} - L_{SLTPS}) \times a\%}{E}$ <p>Keterangan : S_{SLTA} kebutuhan ruang belajar tingkat SLTA; L_{SLP5} proyeksi lulusan SLTP selama 5 tahun sesuai data dan instansi yang berwenang; L_{SLPS} jumlah lulusan SLTP yang dapat ditampung; presentase lulusan SLTP yang melanjutkan ke STLA; a% presentase lulusan SLTP yang melanjutkan ke STLA; E daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan kondisi lingkungan 40 siswa.</p>

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

Tabel 2.5 Kebutuhan luas lantai dan lahan sarana pendidikan menurut tipe sekolah

Tingkat Pendidikan	Tipe Sekolah	Rombongan Belajar (rombongan)	Peserta Didik (siswa)	Luas Ruang Minimum (m ²)	Luas Lahan Minimum (m ²)
SD/MI	Tipe A	12	480	1.000	3.000
	Tipe B	9	360	633	2.000
	Tipe C	6	240	251	1.000
SLTP/MTs	Tipe A	27	1.080	3.077	9.000
	Tipe B	18	720	2.282	9.000
	Tipe C	9	360	1.502	6.000
SMU	Tipe A	27	1.080	5.233	1 lantai: 15.000
					2 lantai: 9.500
					3 lantai: 7.000
	Tipe B	18	720	3.835	1 lantai: 12.500
					2 lantai: 8.000
					3 lantai: 5.000
	Tipe C	9	360	2.692	10.000

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

2.2.1 Sarana Perdagangan dan Niaga

1) Deskripsi Umum

Sarana perdagangan dan niaga ini tidak selalu berdiri sendiri dan terpisah dengan bangunan sarana yang lain. Dasar penyediaan selain berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayaninya, juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan / blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

2) Jenis Sarana

Kebutuhan ruang dan lahan untuk sarana ini akan berkaitan juga dengan daya dukung lingkungan dan jalan yang ada di sekitar bangunan sarana tersebut. Besaran kebutuhan ruang dan lahan menurut penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah:

- a) warung / toko Luas lantai yang dibutuhkan $\pm 50 \text{ m}^2$ termasuk gudang kecil. Apabila merupakan bangunan tersendiri (tidak bersatu dengan rumah tinggal), luas tanah yang dibutuhkan adalah 100 m^2 .
- b) pertokoan (skala pelayanan untuk 6.000 penduduk) Luas lantai yang dibutuhkan 1.200 m^2 . Sedangkan luas tanah yang dibutuhkan 3.000 m^2 . Bangunan pertokoan ini harus dilengkapi dengan:
 - 1) tempat parkir kendaraan umum yang dapat dipakai bersama kegiatan lain pada pusat lingkungan;
 - 2) sarana-sarana lain yang erat kaitannya dengan kegiatan warga;
 - 3) pos keamanan.
- c) pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan ≈ 30.000 penduduk) Luas tanah yang

dibutuhkan: 10.000 m² . Bangunan pusat pertokoan / pasar lingkungan ini harus dilengkapi dengan:

- 1) tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- 2) terminal kecil atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
- 3) pos keamanan;
- 4) sistem pemadam kebakaran;
- 5) musholla/tempat ibadah.

d) pusat perbelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kelurahan ≈ 120.000 penduduk) Luas tanah yang dibutuhkan adalah 36.000 m². Bangunan pusat perbelanjaan harus dilengkapi:

- 1) tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- 2) terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
- 3) pos keamanan;
- 4) sistem pemadam kebakaran;
- 5) musholla/tempat ibadah.

Tabel 2.6 Jenis sarana perdagangan dan niaga

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1.	Toko / Warung	250	50 (termasuk gudang)	100 (bila berdiri sendiri)	0,4	300 m'	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain
2.	Pertokoan	6.000	1.200	3.000	0,5	2.000 m'	Di pusat kegiatan sub lingkungan. KDB 40% Dapat berbentuk P&D
3.	Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	30.000	13.500	10.000	0,33		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4.	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	36.000	0,3		Terletak di jalan utama. Termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

2.2.2 Sarana Kesehatan

1) Deskripsi Umum

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut.

Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

2) Jenis Sarana

Beberapa jenis sarana yang dibutuhkan adalah:

- a) posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita;
- b) balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (curative) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi;
- c) balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA) / Klinik Bersalin), yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan

sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun;

- d) puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
- e) puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;
- f) tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan
- g) apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.

Tabel 2.7 Kebutuhan sarana kesehatan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/rumah
2.	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m'	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3.	BKIA / Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5.	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6.	Tempat Praktek Dokter	5.000	18	-	-	1.500 m'	-idem-	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik
7.	Apotik / Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m'	-idem-	

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Wilayah (Kecamatan Bupon)

Batas wilayah administratif Kecamatan Bupon sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Ponrang, sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Ponrang Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Bajo Barat, dan sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Basseangtempe dan lantimojong.

Luas wilayah administratif kecamatan Bupon yaitu 251.71 *km*² . Dimana terdapat 9 desa, 1 kelurahan, 44 dusun/lingkkungan, 44 RW, dan 44 RT.

3.2 Jumlah penduduk 5 tahun terakhir

Tabel 3.1 Jumlah penduduk 5 tahun terakhir

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	BUPON	14.425	14.506	14.583	14.654	14.718

3.3 Jumlah fasilitas pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

3.3.1 Fasilitas pendidikan

Tabel 3.2 Jumlah fasilitas pedidikan

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	SD	19
2	SMP	11
3	SMA	5

3.3.2 Fasilitas perdagangan

Tabel 3.4 Jumlah fasilitas ekonomi

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	WARUNG	198
2	PERTOKOAN	5
3	PASAR	1

3.3.2 Fasilitas kesehatan

Tabel 3.3 Jumlah fasilitas kesehatan

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	POSKESDES	6
2	PUSTU	5
3	PUSKESMAS	1
4	RUMAH SAKIT	0

3.4 Proyeksi penduduk 20 tahun yang akan datang (2025, 2030, 2035, 2040)

Tabel 3.5 Proyeksi penduduk 20 tahun yang akan dating

No	KECAMATAN	RASIO	2025	2030	2035	2040
1	BUPON	0.004	15,039	15,361	15,682	16,004

3.5 Kebutuhan sarana dan prasarana 20 tahun yang akan datang (2025, 2030, 2035, 2040)

3.5.1 Sarana Pendidikan

1) Tahun 2025

Tabel 3.6 Kebutuhan sarana Pendidikan ditahun 2025

No	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2025	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	SD	19	15,039	1,600	9	29
2	SMP	11		4,800	3	14
3	SMA	5		4,800	3	8

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

2) Tahun 2030

Tabel 3.7 Kebutuhan sarana pendidikan ditahun 2030

No	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2030	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	SD	19	15,361	1,600	10	29
2	SMP	11		4,800	3	14
3	SMA	5		4,800	3	8

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

3) Tahun 2035

Tabel 3.8 Kebutuhan sarana pendidikan ditahun 2035

No	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2035	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	SD	19	15,862	1,600	10	29
2	SMP	11		4,800	3	14
3	SMA	5		4,800	3	8

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

4) Tahun 2040

Tabel 3.9 Kebutuhan sarana Pendidikan ditahun 2040

No	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2040	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	SD	19	16,004	1,600	10	29
2	SMP	11		4,800	3	14
3	SMA	5		4,800	3	8

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

3.5.2 Sarana ekonomi

1) Tahun 2025

Tabel 3.10 Kebutuhan sarana ekonomi ditahun 2025

No	SARANA EKONOMI	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2025	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	WARUNG	22	15,039	250	60	82
2	PERTOKOAN	187		6,000	3	190
3	PASAR	0		30,000	1	1

2) Tahun 2030

Tabel 3.11 Kebutuhan sarana ekonomi ditahun 2030

No	SARANA EKONOMI	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2030	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	WARUNG	22	15,361	250	61	39
2	PERTOKOAN	187		6,000	3	0
3	PASAR	0		30,000	1	1

3) Tahun 2035

Tabel 3.12 Kebutuhan sarana ekonomi ditahun 2035

No	SARANA EKONOMI	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2035	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	WARUNG	22	15,862	250	63	85
2	PERTOKOAN	187		6,000	0	0
3	PASAR	0		30,000	0	0

4) Tahun 2040

Tabel 3.13 Kebutuhan sarana ekonomi ditahun 2040

No	SARANA EKONOMI	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2040	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	WARUNG	22	16,004	250	64	86
2	PERTOKOAN	187		6,000	0	0
3	PASAR	0		30,000	0	0

3.5.3 Sarana kesehatan

1) Tahun 2025

Tabel 3.14 Kebutuhan sarana kesehatan ditahun 2025

No	SARANA KESEHATAN	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2025	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	PUSTU	4	15,039	30,000	1	5
2	PUSKESMAS	1		120,000	0	0
3	RUMAH SAKIT	0				

2) Tahun 2030

Tabel 3.15 Kebutuhan sarana kesehatan ditahun 2030

No	SARANA KESEHATAN	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2030	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	PUSTU	4	15,361	30,000	1	5
2	PUSKESMAS	1		120,000	0	0
3	RUMAH SAKIT	0				

3) Tahun 2035

Tabel 3.16 Kebutuhan sarana kesehatan ditahun 2035

No	SARANA KESEHATAN	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2035	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	PUSTU	4	15,862	30,000	1	5
2	PUSKESMAS	1		120,000	0	0
3	RUMAH SAKIT	0				

4) Tahun 2040

Tabel 3.17 Kebutuhan sarana kesehatan ditahun 2040

No	SARANA KESEHATAN	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2040	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	PUSTU	4	16,004	30,000	1	5
2	PUSKESMAS	1		120,000	0	0
3	RUMAH SAKIT	0				

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 4.1.1 Ketersediaan sarana pendidikan di Kecamatan Bupon pada saat ini umumnya telah memadai, dan juga terutama untuk sarana perdagangan & niaga.
- 4.1.2 Kebutuhan sarana permukiman di Kecamatan Bupon untuk 20 tahun kedepan sangat diperlukan. Minimnya ketersediaan sarana kesehatan dan pertumbuhan jumlah pelajar, maka fasilitas seperti posyandu dan sekolah sangat diperlukan di Kecamatan bupon.

4.2 Saran

- 4.2.1 Perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk sarana yang belum tersedia di Kecamatan Bupon khususnya sarana kesehatan. Dengan ketersediaan kebutuhan fasilitas tersebut, diharapkan pelayanannya dapat menjangkau seluruh lingkungan permukiman yang ada di kecamatan Bupon.
- 4.2.2 Perlu adanya evaluasi dari pemerintah untuk sarana kesehatan di Kecamatan Bupon yang tidak merata antara satu Kelurahan dengan kelurahan lainnya.
- 4.2.3 Menurut penulis berdasarkan eksisting sebaran sarana kesehatan kecamatan Bupon perlu dapat perhatian lebih dari pemerintah dikarenakan minimnya ketersediaan sarana dikecamatan Bupon.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://adoc.pub/bab-i-pendahuluan-suatu-daerah-pertumbuhan-ekonomi-yang-berk.html>
- <http://repository.unpas.ac.id/32601/2/BAB%20II.pdf>
- http://nawasis.org/portal/download/digilib/369-SNI-2004_1733_03.pdf
- <http://www.radarplanologi.com/2016/04/metode-analisis-sarana-wilayah-dalam-perencanaan-pembangunan.htm>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Bua_Ponrang,_Luwu
- <https://luwukab.bps.go.id/publication/2015/12/07/225435e70d7aa5685b9246d3/kecamatan-bupon-dalam-angka-2015.html>
- <https://luwukab.bps.go.id/publication/2017/09/26/5c557deed4f7762339eb3ab/kecamatan-bupon-dalam-angka-2017.html>
- <https://luwukab.bps.go.id/publication/2018/09/26/463325c6a5291f7db614245b/kecamatan-bupon-dalam-angka-2018.html>
- <https://luwukab.bps.go.id/publication/2019/09/26/c907baad504e6643e9d4e327/kecamatan-bupon-dalam-angka-2019.html>
- <https://luwukab.bps.go.id/publication/2020/09/28/257acef9dc17dbb566fda3f1/kecamatan-bupon-dalam-angka-2020.html>
- Fisu, A. A., & Didiaryono, D. (2020, April). Economic & Financial Feasibility Analysis of Tarakan Fishery Industrial Estate Masterplan. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 469, No. 1, p. 012002). IOP Publishing.
- Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 22-28.